

# **Rencana Strategis (Renstra)**

Kapanewon Piyungan

Tahun 2021-2026

---

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD); dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih dan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2017 - 2022 serta

mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS RPJMD Tahun 2021-2024 dan RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.

Kapanewon Piyungan semula adalah Kecamatan Piyungan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bupati No 130 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul, dimana kecamatan merupakan perangkat daerah unsur penunjang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Adanya UU no 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta diikuti dengan penyesuaian nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan sampai dengan Kalurahan.

Perubahan Kecamatan menjadi Kapanewon sebagaimana terdapat dalam pasal 1 ayat 11 Perda Kabupaten Bantul no 8 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul serta dalam pasal 1 ayat 8 Perda Kabupaten Bantul no 5 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang menyebut bahwa Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten. Sejak berlakunya Perda tersebut kecamatan di Kabupaten Bantul menjadi Kapanewon termasuk juga Kapanewon Piyungan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);
- h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
- i. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 109);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten

Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);

- m. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 123);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

### BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

### BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

### BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

### BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### BAB VIII. PENUTUP

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

Kapanewon Piyungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum. Kapanewon Piyungan dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon di Kabupaten Bantul, Kapanewon Piyungan mempunyai tugas membantu bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Piyungan memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;

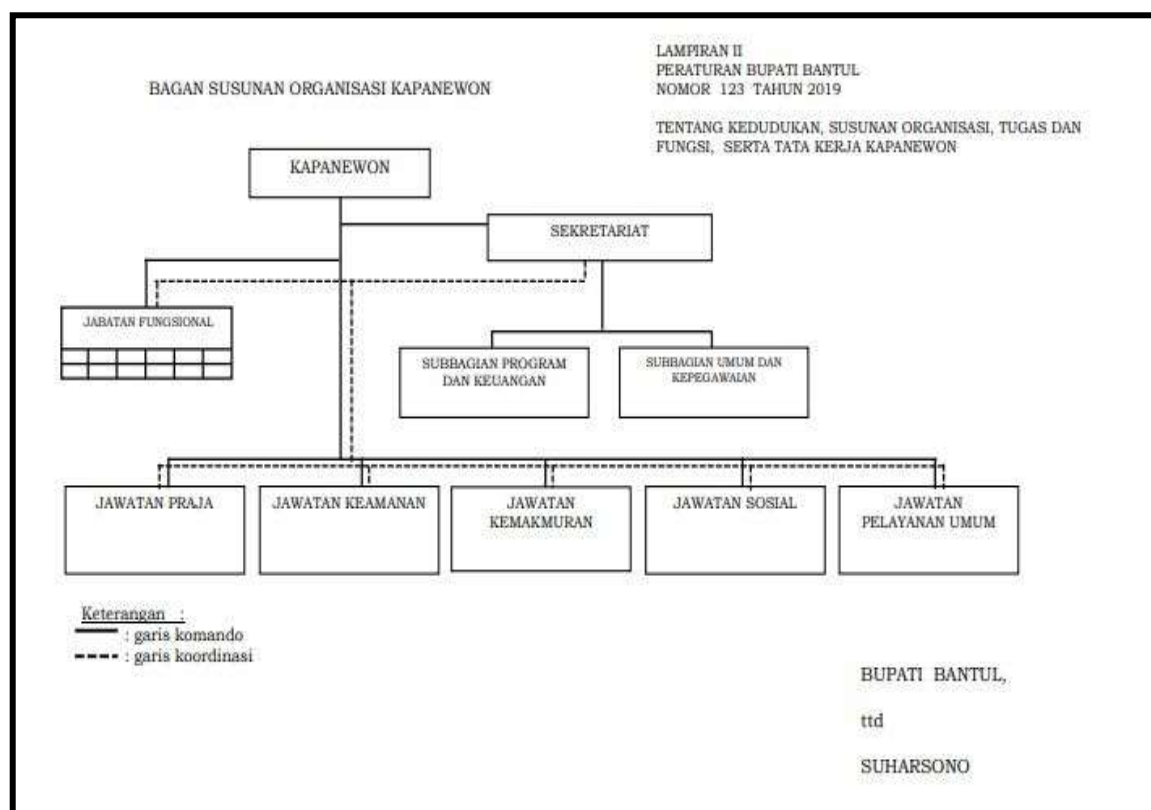
- l. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat;
- b. Jawatan Praja;
- c. Jawatan Keamanan;
- d. Jawatan Pelayanan Umum;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1  
Bagan Susunan Organisasi Kapanewon Piyungan





Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

### **Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum dan hubungan masyarakat, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Penyusunan program kerja kapanewon;
- c. Pengordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan kapanewon;
- d. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kepegawaian kapanewon;
- f. Penyelenggaraan kerumah tanggaan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah, kepustakaan, kerasipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan kapanewon;
- h. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- j. Pelaksanaan program kesekretariat;
- k. Pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan.
- l. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja sekretariat;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Kapanewon terdiri atas :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kerasipan, kehumasan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan.

Subag Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Pengelolaan data kepegawaian kapanewon;
- c. Penyiapan bahan mutasi pegawai kapanewon;

- d. Penyiapan kesejahteraan pegawai kapanewon;
- e. Penyelenggaraan kerumahtanggaan kapanewon;
- f. Penyelenggaraan tata persuratan dan kerasipan;
- g. Pengelolaan barang milik daerah;
- h. Penyiapan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
- i. Penyiapan dan pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan ketata laksanaan;
- j. Penyelenggaraan administrasi perkantoran;
- k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur;
  - l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbag umum dan kepegawaian;
  - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan panewu anom sesuai tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset mempunyai tugas: melaksanakan tugas dan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyajian data dan informasi.

Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sub bagian program dan keuangan;
- b. Penyusunan rencana program kapanewon;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran kapanewon;
- e. Penyiapan pengumpulan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- f. Pengelolaan keuangan kapanewon;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja kapanewon;
- h. Pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaporan urusan keistimewaan kalurahan;
- i. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang dinerikan panewu anom sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Jawatan Praja**

Jawatan Praja mempunyai tugas: melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan melaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di Bidang pertanahan dan tata ruang di tingkat Kapanewon.

Jawatan Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;

- b. pelaksanaan urusan pemerintahan umum di lingkup Kapanewon, meliputi :
1. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
  3. pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
  4. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
  5. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kapanewon untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
  7. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di tingkat Kapanewon;
- c. penyiapan bahan dan sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
- d. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah Kapanewon;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan di Kapanewon, Perangkat Daerah dan instansi vertikal di tingkat Kapanewon;
- f. pengoordinasian administrasi pertanahan;
- g. pengoordinasian administrasi kependudukan;
- h. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur Kalurahan, yang meliputi;
1. fasilitasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
  2. fasilitasi penyusunan Peraturan Kalurahan;
  3. fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan;
  4. fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
  5. fasilitasi penetapan dan penyelesaian sengketa batas Kalurahan;
  6. fasilitasi pengusulan pejabat Lurah;

7. fasilitasi pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah dan Pamong Kalurahan;

- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan serta pengawasan terhadap Lurah dan Pamong Kalurahan;
- j. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan dan tata ruang;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kapanewon;
- l. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di wilayah Kapanewon;
- m. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Praja; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Keamanan**

Jawatan Keamanan mempunyai tugas: mengoordinasikan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah Kapanewon.

Jawatan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kapanewon dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus ormas, pengurus organisasi sosial dan pengurus organisasi politik;
- d. penyiapan bahan dan sinergitas dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- f. pengoordinasian penanggulangan bencana alam dan kebakaran ;
- g. penyelenggaraan kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pelaksanaan pemantauan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Keamanan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Jawatan Pelayanan Umum**

Jawatan Pelayanan Umum mempunyai tugas merencanakan kegiatan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon.

Jawatan Umum mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Pelayanan Umum;
- b. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kapanewon;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Kapanewon;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kapanewon;
- e. pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon;
- f. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan satu pintu di Kapanewon;
- g. pelaksanaan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pelayanan;
- h. melaksanakan percepatan pencapaian standar pelayanan publik;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik di Kapanewon dan Kalurahan;
- j. pelaksanaan penyusunan indeks kepuasan masyarakat;
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kapanewon;
- l. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Umum;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Jawatan Kemakmuran**

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat kalurahan dibidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup.

Jawatan Kemakmuran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kapanewon;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kalurahan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kapanewon;

- f. penyiapan bahan dan sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- i. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang ekonomi, pembangunan dan lingkungan hidup di tingkat Kapanewon;
- j. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Kemakmuran; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Jawatan Sosial**

Jawatan Sosial mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, pemuda dan olahraga serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan Keistimewaan bidang kebudayaan di tingkat Kapanewon.

Jawatan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- c. pelaksanaan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan di tingkat Kapanewon;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penanganan masalah kemiskinan;
- e. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal, serta instansi swasta yang tugas dan fungsinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat Kalurahan di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan, serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan;
- i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Jawatan Sosial; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panewu terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah pegawai Kapanewon Piyungan sebanyak 23 orang terdiri ASN sebanyak 19 Orang dan Non ASN sebanyak 4 Orang,

Tabel 2.1 Pegawai Kapanewon Piyungan berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Nama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Panewu	1	-	1
2	Sekretariat:			
	Panewu Anom	1	-	1
	Sub Bagian Program dan Keuangan	1	2	3
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	2	2	4
3	Jawatan Praja	2	-	2
4	Jawatan Keamanan	1	1	2
5	Jawatan Pelayanan Umum	-	1	1
6	Jawatan Kemakmuran	-	2	2
7	Jawatan Sosial	3		3
8	Non ASN	3	1	4
<b>Jumlah</b>		<b>14</b>	<b>9</b>	<b>23</b>

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan per September 2021

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Piyungan yang menduduki jabatan struktural berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2

Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural menurut eselon

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon Iva	4
4	Eselon IVb	2
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan per 1 September 2021

Mengenai tingkat pendidikan pegawai Kapanewon Piyungan yang berjumlah 20 orang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3  
Tingkat Pendidikan Pegawai Kapanewon Piyungan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S – 2	2
2	S – 1	11
3	D – 3	-
4	SLTA/Sederajat	9
5	SLTP/Sederajat	1
6	SD/Sederajat	-
	<b>Jumlah</b>	<b>23</b>

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan per 1 September 2021

Dengan dukungan 23 orang yang pada Kapanewon Piyungan dengan komposisi pendidikan S-2: 2 (dua) orang, sarjana: 11 (sebelas) orang, SLTA sebanyak 9 (lima) orang, dan SMP; 1 (satu) orang merupakan potensi sumber daya manusia yang baik dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

Berikut analisis kebutuhan pegawai berdasarkan formasi pegawai sesuai dengan Peraturan Bupati nomor 123 Tahun 2019.

Tabel 2.4  
Analisis Kebutuhan Pegawai Kapanewon Piyungan

No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
1	Panewu	1	1	-
2	Panewu Anom	1	1	-
3	Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian	1	1	-
4	Pengadministrasi Umum	1	2	Kelebihan 1
5	Petugas Keamanan	1	-	1
6	Pramu Kebersihan	1	-	1
7	Pramu Bhakti	1	1	-
8	Analisis Tata Laksana	1	-	1
9	Kepala Subbag Program dan Keuangan	1	1	-
10	Pengadministrasi Umum	1	-	1
11	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	1	-	1
12	Bendahara	1	1	-
13	Verifikator Keuangan	1	-	1
14	Pengadministrasi Keuangan	1	1	-
15	Jawatan Praja	1	1	-
16	Pengadministrasi Umum	1	-	1
17	Pengelola Data	1	-	1



No.	Nama Jabatan	Formasi Ideal	Jumlah Pegawai Saat Ini	Kekurangan Pegawai
18	Analisis Pemerintahan Daerah	1	1	-
19	Jawatan Keamanan	1	1	-
20	Pengadministrasi Umum	1	-	1
21	Analisis Keamanan	1	1	-
22	Jawatan Pelayanan Umum	1	1	-
23	Pengadministrasi Umum	1	-	1
24	Pengelola Layanan Operasional	1	-	1
25	Analisis Pelayanan	1	-	1
26	Jawatan Kemakmuran	1	1	-
27	Pengadministrasi Umum	1	-	1
28	Analisis Pembangunan	1	1	-
29	Jawatan Sosial	1	1	-
30	Pengadministrasi Umum	1	1	-
31	Analisis Masyarakat	1	1	-
		31	19	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan, September 2021.

Dari analisis data di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- Jumlah pegawai berdasar formasi jabatan yang ideal dalam mendukung proses bisnis kapanewon adalah 27 jenis, dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati Bantul No.160 Tahun 2020 Tentang Formasi dan Analisa Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, namun kondisi saat ini ada beberapa pegawai Kapanewon yang latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan dalam peraturan.
- Kondisi jumlah pegawai yang berkurang serta formasi jabatan yang diisi oleh pegawai yang mendekati masa purna tugas, sehingga pada tahun ke-n jumlah pegawai yang dibutuhkan semakin besar.
- Kekurangan dan kekosongan jabatan diharapkan dapat segera terisi sesuai dengan pendidikan dan kualifikasi yang ditentukan, sehingga dapat mendukung kelancaran proses bisnis yang dilaksanakan Kapanewon Piyungan
- Kondisi pegawai yang banyak mendekati masa purna tugas, menjadi hambatan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, yang dipaksa keadaan untuk dapat menguasainya sebagai dukungan pencapaian terhadap program Bantul Kabupaten Kreatif terlebih di masa pandemi Covid 19

### 2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Kapanewon Piyungan didukung pula dengan sarana prasarana. Sarana prasarana berupa bangunan gedung beserta isinya. Sarana prasarana ada yang berkondisi

masih bagus ( B ), rusak berat ( RB ) maupun rusak ringan ( RR ) . Adapun sarana prasarana berupa aset/barang modal sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Sarana dan Prasarana Kapanewon Piyungan

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
1	A.C. Sentral	B	8
2	A.C. Split	B	4
3	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) Lain-lain	B	2
4	Amplifier	RR	1
5	Camera Digital	B	1
6	Compact Disc	RR	1
7	Digital LED Running Text	B	2
8	Facsimile	B	1
9	Filing Cabinet Besi	RR	4
10	Filing Cabinet Besi	B	8
11	Filing Cabinet Kayu	RR	1
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	RR	1
13	Gambar Presiden/Wakil Presiden	B	2
14	Handy Talky (HT)	RR	1
15	Sepeda Motor	B	6
16	Sepeda Motor	RB	1
17	Kipas Angin	RR	3
18	Komputer Unit Lainnya	B	9
19	Komputer Unit Lainnya	RR	2
20	Kursi kayu	B	40
21	Kursi kayu	RR	8
22	Kursi Kerja Staf	B	3
23	Kursi Lipat	B	15
24	Kursi Lipat	RR	6
25	Kursi Putar	B	12
26	Kursi Rapat	B	77
27	Kursi tamu	B	6
28	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	B	1
29	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	B	1
30	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	RR	1
31	Lap Top	B	4
32	Lemari Besi/Metal	B	3
33	Lemari Es	B	1
34	Lemari Kayu	B	13
35	Meja 1/2 Biro	B	3
36	Meja Kerja Kayu	B	42
37	Meja Kerja Pejabat Eselon III	B	2
38	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	B	5
39	Meja Komputer	B	6
40	Meja Komputer	RR	1
41	Meja Rapat	B	37
42	Meja Resepsionis	B	7
43	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi )	RR	2
44	Microphone	B	3
45	Microphone Floor Stand	B	4
46	Microphone Table Stand	B	1
47	Microphone/Wireless MIC	B	1

No	Nama dan Jenis Barang	Kondisi	Jumlah
48	Mimbar/Podium	RR	1
49	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang kebawah )	B	1
50	Note Book	RR	1
51	Peralatan Komputer lainnya (UPS)	RR	3
52	Pesawat Telephone	RR	1
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	B	12
54	Rak Besi	RR	2
55	Rak Kayu	RR	2
56	Scanner (Universal Tester)	B	1
57	Sepeda	RR	1
58	Sound System	RR	4
59	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	RR	1
60	Telephone (PABX)	B	9
61	Televisi	B	3
62	Televisi	RB	1
63	Uninterruptible Power Supply (UPS)	B	5
64	Wireless	B	1
65	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Pemerintahan	B	1
66	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
67	Bangunan Gedung Kantor Permanen	B	1
68	Pagar Permanen/Pagar Kantor	B	1
69	Bangunan Lain-lain/Area Merokok	B	1
70	Bangunan Gudang Tertutup Permanen/Gudang	B	1
71	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen/Gedung Kantor Sebelah Barat	B	1
72	Bangunan Parkir Terbuka Permanen/Tempat Parkir	B	1
73	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen/Mushola	B	1
	<b>Jumlah</b>		<b>421</b>

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan

Tabel 2.6

Analisis kebutuhan/kekurangan sarana prasarana Kapanewon Piyungan

No.	Nama Barang	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan
1	AC Split	20	12	8
2	LCD Proyektor	2	1	1
3	CCTV	2	-	2
4	Peralatan zoom	2	-	2
5	Komputer Unit Lainnya	25	11	14
6	Sound system	8	4	4
7	Pagar besi	250 m	100 m	150 m
8	Backdrop dan meja pelayanan	2	1	1
9	Wireless	3	1	2
10	Scanner	2	1	1
11	Sepeda motor	10	6	4

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Kapanewon Piyungan tahun 2021

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka meningkatkan operasional dan pelayanan kepada masyarakat Kapanewon Piyungan, ternyata kebutuhan akan sarana prasarana semakin bertambah dan bervariasi. Sarana prasarana yang ada sekarang akan mengalami penyusutan dan perubahan kondisi yang semakin lama semakin menurun. Oleh karena itu pemeliharaan maupun pembaharuan dan penambahan sarana prasarana sangat diperlukan.

## **2.3 Kinerja Perangkat Daerah**

### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Secara umum Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021. Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 2.7  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan  
Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	IKM Kecamatan	n/a	80	85	90	90	90	n/a	93,78	95,71	89,22	93,67	90	n/a		117,22	112,6	99,13	
	Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	n/a	85%	90%	-	-	-	n/a	78.42.00	66.66%	-	-	-	n/a	92.26	74.06	-	-	
	Persentase desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	n/a	-	-	95%	100%	100%	n/a	-	-	95%	100%	100%	n/a	-	-	100%	100	
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	n/a	80%	85%	88%	90%	90%		100%	85%	88%	100%	90%	n/a	100	100	100%	111.11	
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	n/a	80%	85%	90%	100%	100%	n/a	80%	85%	90%	18.02	100%	n/a	100	100	100	18.02	
	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>n/a</b>					<b>100%</b>						<b>100%</b>						<b>100%</b>
	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan	n/a					100%						100%						100%
	Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan	n/a					92 angka						92 angka						92 angka
	<b>Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat</b>	<b>n/a</b>					<b>100%</b>						<b>100%</b>						<b>100%</b>
	Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa						100%						100%						100%
	<b>Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Kapanewon</b>	<b>n/a</b>					<b>100%</b>						<b>100%</b>						<b>100%</b>
	Capaian Kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum						100%						100%						100%
	<b>Cakupan Stabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum</b>	<b>n/a</b>					<b>100%</b>						<b>100%</b>						<b>100%</b>
	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum						100%						100%						100%
	<b>Cakupan Pelayanan Masyarakat</b>	<b>n/a</b>					<b>89 Angka</b>						<b>89 Angka</b>						<b>100%</b>

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Layanan yang diberikan					20 jenis							20 jenis						100%
	Masyarakat yang dilayani					6.000 orang							6.000 orang						100%
	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	n/a				<b>95 persen</b>							<b>95 persen</b>						<b>100%</b>
	Laporan pembinaan bidang keagamaan					1 laporan							1 laporan						100%
	Laporan bidang sosial					1 laporan							1 laporan						100%
	Laporan pembinaan bidang kesehatan					4 laporan							4 laporan						100%
	Laporan upaya penanggulangan kemiskinan					3 laporan							3 laporan						100%
	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	n/a				<b>95 persen</b>							<b>95 persen</b>						<b>100%</b>
	Laporan rakor Muspika					2 laporan							2 laporan						100%
	Pelaksanaan upacara peringatan hari besar nasional					3 kali							3 kali						100%
	Laporan monev penanggulangan bencana					5 laporan							5 laporan						100%
	Laporan pemantauan keamanan lingkungan					4 laporan							4 laporan						100%
	Pendampingan pengelolaan keuangan desa					2 laporan							2 laporan						100%
	Laporan pembinaan pengendalian pemerintahan desa					3 laporan							3 laporan						100%
	Laporan pemantauan Pilkada dan Pilurdes					2 laporan							2 laporan						100%
	<b>Cakupan Pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	n/a				<b>95 persen</b>							<b>95 persen</b>						<b>100%</b>
	Laporan hasil pemberdayaan masyarakat					4 laporan							4 laporan						100%
	Dokumen profil desa monografi kecamatan					2 dokumen							2 dokumen						100%
	Dokumen musrenbang kecamatan					2 dokumen							2 dokumen						100%
	<b>Cakupan Pelayanan Masyarakat</b>	n/a			<b>86 angka</b>								<b>86 angka</b>						<b>100%</b>
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan				11 kali								11 kali						100%

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	n/a			<b>90 persen</b>						<b>90 persen</b>						<b>100%</b>		
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi TKPK				5 kali						5 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan BImtek KeluargaTangguh				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah pengiriman peserta gelar budaya daerah				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah pengiriman peserta upacara/bergodo dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bantul				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan gebyar senam massal				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani bersama dinas/instansi/pamong				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah koordinasi/pembinaan/pengiriman kegiatan olah raga				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk)				12 kali						12 kali						100%		
	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	n/a			<b>95 persen</b>						<b>95 persen</b>						<b>100%</b>		
	Jumlah pelaksanaan Musrenbang																		
	Jumlah pelaksanaan bimtek pengendalian keamanan lingkungan				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah koordinasi keamanan lingkungan				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah koordinasi/pemantauan UNAS dan PAUD				6 kali						6 kali						100%		
	Jumlah koordinasi dan pendampingan pengelolaan keuangan desa				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan bimtek pengelolaan keuangan desa				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan kerja bhakti massal bersama Muspika				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah koordinasi Muspika				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan Workshop Muspika				3 kali						3 kali						100%		

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target						Realisasi						Rasio Capaian					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pelaksanaan rakorpem desa				3 kali						3 kali						100%		
	Jumlah pembinaan Paskibra				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar nasional				13 kali						13 kali						100%		
	Tersusunnya dokumen profil desa dan monografi kecamatan				2 dokumen						2 dokumen						100%		
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUB (Forum Komunikasi antar Umat Beragama)				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi kegiatan keagamaan				6 kali						6 kali						100%		
	Jumlah pengiriman dan pembinaan kafilah STQ/MTQ ke tingkat Kabupaten				1 kali						1 kali						100%		
	<b>Cakupan Pemberdayaan masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>n/a</b>			<b>90 persen</b>						<b>90 persen</b>						<b>100%</b>		
	Jumlah pengiriman promosi produk unggulan kecamatan pada Bantul Expo (BE)				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah koordinasi dan pembinaan kewirausahaan				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah koordinasi persiapan dan pelaksanaan lomba tk kecamatan/desa				4 kali						4 kali						100%		
	Jumlah koordinasi dalam rangka pembinaan organisasi perempuan				12 kali						12 kali						100%		
	Jumlah pelatihan penanggulangan bencana alam				2 kali						2 kali						100%		
	Jumlah koordinasi/pemantauan/monitoring daerah rawan bencana alam				3 kali						3 kali						100%		
	<b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>n/a</b>			<b>85 angka</b>						<b>85 angka</b>						<b>100%</b>		
	Publikasi dan informasi potensi wilayah				1 kali						1 kali						100%		
	Jumlah peserta koordinasi pengelolaan administrasi kependudukan				150 ok						150 ok						100%		



No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah Sosialisasi perijinan (UMK)			5 kali					5 kali							100%			
	<b>Cakupan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan</b>	n/a		<b>100 persen</b>					<b>100 persen</b>							<b>100%</b>			
	Jumlah penyelenggaraan koordinasi TKPK			6 kali					6 kali							100%			
	Jumlah pelatihan kewirausahaan (UMKM)			2 kali					2 kali							100%			
	Jumlah koordinasi UMKM																		
	Jumlah pengiriman kesenian pada gelar budaya daerah			3 kali					3 kali							100%			
	Jumlah pengiriman bergodo upacara hari jadi Kab. Bantul			1 kali					1 kali							100%			
	Jumlah pembinaan organisasi olah raga			4 kali					4 kali							100%			
	Jumlah penyelenggaraan senam massal			1 kali					1 kali							100%			
	Jumlah pelaksanaan senam kesegaran jasmani (SKJ)			6 kali					6 kali							100%			
	Jumlah pelaksanaan PSN			12 kali					12 kali							100%			
	<b>Cakupan Pemerintahan Umum Kecamatan</b>	n/a		<b>100 persen</b>					<b>100 persen</b>							<b>100%</b>			
	Jumlah pelaksanaan musrenbang kecamatan			1 kali					1 kali							100%			
	Jumlah pelaksanaan evaluasi pembangunan			3 kali					3 kali							100%			
	Jumlah Koordinasi pengendalian keamanan lingkungan			4 kali					4 kali							100%			
	Jumlah bimtek pengendalian keamanan lingkungan			3 kali					3 kali							100%			
	Jumlah pemantauan kegiatan UNAS			3 kali					3 kali							100%			
	Jumlah pemantauan PAUD			3 kali					3 kali							100%			
	Jumlah bimtek pengendalian pengelolaan keuangan desa			2 kali					2 kali							100%			
	Jumlah koordinasi pengendalian pengelolaan keuangan desa			4 kali					4 kali							100%			
	Jumlah kegiatan kerja bhakti massal			1 kali					1 kali							100%			

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah koordinasi rutin muspika			4 kali					4 kali						100%				
	Jumlah pelaksanaan workshop Muspika			3 kali					3 kali						100%				
	Jumlah pelaksanaan bimtek keluarga tangguh			3 kali					3 kali						100%				
	Jumlah pelaksanaan rakorpem desa			3 kali					3 kali						100%				
	Jumlah pelaksanaan upacara bendera peringatan hari besar Nasional			13 kali					13 kali						100%				
	Jumlah koordinasi dalam rangka penyusunan profil desa monografi kecamatan			2 kali					2 kali						100%				
	Tersusunnya dokumen profil Desa Monografi Kecamatan			2 dokumen					2 dokumen						100%				
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)			1 kali					1 kali						100%				
	Jumlah koordinsi kegiatan keagamaan			7 kali					7 kali						100%				
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FKUB (Forum Komunikasi antar Umat Beragama)			1 kali					1 kali						100%				
	Jumlah penyelenggaraan kegiatan FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)			1 kali					1 kali						100%				
	<b>Cakupan Pembedayaan masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	<b>n/a</b>		<b>100 persen</b>					<b>100 persen</b>						<b>100%</b>				
	Pengiriman kegiatan Bantul Expo			1 kali					1 kali						100%				
	Jumlah koordinasi persiapan lomba tk kecamatan/desa			2 kali					2 kali						100%				
	Jumlah pelaksanaan lomba tingkat Kecamatan/Desa			2 kali					2 kali						100%				
	Jumlah pembinaan organisasi perempuan			12 kali					12 kali						100%				

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi					Rasio Capaian							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Jumlah pertemuan kelompok tani			5 kali					5 kali						100%				
	Jumlah pelatihan penanggulangan bencana alam			2 kali					2 kali						100%				
	Jumlah pemantauan dan sosialisasi bencana alam			4 kali					4 kali						100%				
	<b>Cakupan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa</b>	<b>n/a</b>	<b>100 persen</b>						<b>100 persen</b>						<b>100%</b>				
	Jumlah pelaksanaan lomba desa		1 kali						1 kali						100%				
	pra musrenbang dan musrenbang kec		2 kali						2 kali						100%				
	keikutsertaan pameran		1 kali						1 kali						100%				
	<b>Cakupan pemberdayaan Masyarakat Tingkat kecamatan</b>	<b>n/a</b>	<b>100 persen</b>						<b>100 persen</b>						<b>100%</b>				
	koordinasi pembinaan PKK		12 kali						12 kali						100%				
	fasilitasi kelompok petani		4 kali						4 kali						100%				
	sosialisasi daerah rawan bencana		4 kali						4 kali						100%				
	<b>Cakupan pelayanan pemerintahan umum</b>	<b>n/a</b>	<b>100 persen</b>						<b>100 persen</b>						<b>100%</b>				
	penyusunan draft profil kecamatan		2 dokumen						2 dokumen						100%				
	pemasangan jb tv online kawasan industri		1 kali						1 kali						100%				
	pembinaan anggota linmas		2 kali						2 kali						100%				
	koordinasi keamanan lingkungan		4 kali						4 kali						100%				
	pemantauan UNAS		4 kali						4 kali						100%				
	koordinasi sosialisasi wajar 9 tahun		4 kali						4 kali						100%				
	pelaksanaan upacara		13 kali						13 kali						100%				
	pengadaan seragam paskibra		90 setel						90 setel						100%				
	koordinasi persiapan upacara		13 kali						13 kali						100%				
	lomba upacara		2 kali						2 kali						100%				
	kegiatan pengajian		3 kali						3 kali						100%				
	fasilitasi kontingen MTQ		3 kali						3 kali						100%				
	koordinasi keagamaan		2 kali						2 kali						100%				



Berdasarkan capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Dlingo tahun 2016-2021 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu Tahun Anggaran 2016 – 2021 terdapat perubahan indikator kinerja Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan. Perbedaan Indikator kinerja ini tertuang pada perubahan RPJMD pada tahun 2018 yaitu :

Indikator Persentase desa yang menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu berubah menjadi Persentase desa dengan penyelesaian APBDDes tepat waktu.

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir semua Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Piyungan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. IKU yang belum tercapai pada Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan pada tahun anggaran 2020. Hal ini karena adanya pandemi covid 19 dimana banyak anggaran yang terkena refocusing/ peralihan anggaran untuk penanganan covid 19.

Sedangkan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2016-2021 hampir semua dapat dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan. Adapun faktor yang mendorong tercapainya target program dan kegiatan adalah :

- Perencanaan, penganggaran, dan penggunaannya sesuai dengan target yang telah ditentukan
- Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, kinerja SDM dan pendanaan yang memadai
- Kerjasama dan dukungan dari Pemkab, Dinas/Instansi, Kalurahan dan lembaga masyarakat
- Optimalisasi pendampingan ke Kalurahan serta adanya kerjasama dan dukungan yang baik dari Kalurahan, Pendamping Desa dan Lembaga masyarakat

### **2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di dasarkan pada IKU (Indikator Kinerja Utama) Kapanewon Piyungan serta didukung dengan anggaran dari Kabupaten Bantul. Besaran anggaran sebagaimana tertuang dalam DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Selain untuk pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 2.8  
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan  
 Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran						Realisasi						Rasio Realisasi dan Anggaran					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung	n/a	1.745.914.000	1.549.242.324	1.409.925.698	1.430.633.199		n/a	1.543.644.965	1.344.742.324	1.207.656.663	1.182.879.294	-	n/a	88,41	86,80	85,65	82,68	-
2	Belanja Langsung:	n/a	768.619.500	854.656.350	868.720.000	680.000.000		n/a	764.399.700	846.637.833	859.993.302	676.786.134	-	n/a	99,45	99,06	99,00	99,53	-
3	belanja pegawai	n/a	25.880.000	15.690.000	91.280.000	89.340.000		n/a	25.880.000	15.690.000	91.280.000	89.340.000	-	n/a	100	100	100	100	-
4	belanja barang jasa	n/a	705.739.500	809.531.350	728.690.000	559.160.000		n/a	701.519.700	801.512.833	719.963.302	555.946.134	-	n/a	99,40	99,01	98,80	99,43	-
5	belanja modal	n/a	37.000.000	29.435.000	48.750.000	31.500.000		n/a	37.000.000	29.435.000	48.750.000	31.500.000		n/a	100	100	100	100	-
6	Belanja Operasi						3.078.822.614						3.078.822.614						-
7	Belanja Modal						8.000.000						8.000.000						
			<b>2.514.533.500</b>	<b>2.403.898.674</b>	<b>2.278.645.698</b>	<b>2.110.633.199</b>	<b>3.086.822.614</b>	-	<b>2.308.044.665</b>	<b>2.191.380.157</b>	<b>2.067.649.965</b>	<b>1.859.665.428</b>	<b>3.086.822.614</b>		<b>91,79</b>	<b>91,16</b>	<b>90,74</b>	<b>88,11</b>	-

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa untuk realisasi keuangan dari tahun 2016-2021 dapat tercapai. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari semua pihak sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang sudah ditentukan. Dengan capaian realisasi keuangan tersebut realisasi fisik kegiatan sudah tercapai 100%. Sisa anggaran yang ada merupakan hasil efisiensi anggaran.

Berdasarkan tren capaian dari tahun 2016-2021, maka tahun 2017 merupakan tahun dengan pencapaian realisasi paling tinggi dibanding dengan tahun-tahun yang lain karena semua kegiatan dapat dilaksanakan. Sedangkan tahun 2020 merupakan capaian realisasi paling rendah karena tidak semua anggaran terserap, banyak kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya pandemi covid 19. Pada tahun 2020 ada refocusing/ pengalihan anggaran untuk kegiatan penanganan covid-19 di Kabupaten Bantul.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan untuk kegiatan di Kapanewon Piyungan antara lain :

1. Perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan program kegiatan yang akan dilaksanakan
2. Penjadwalan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kegiatan
3. Komitmen dari semua pihak untuk melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tantangan Kapanewon Piyungan dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- Tingginya ekspektasi / harapan masyarakat terhadap pelayanan prima ( pelayanan cepat, murah, dan mudah, dan akurat) sehingga perlu adanya inovasi pelayanan yang terus menerus guna meningkatkan pelayanan masyarakat.
- Era keterbukaan informasi publik menuntut pelayanan informasi secara cepat, mudah dan transparandan dibutuhkan sebuah standar pelayanan maupun standar operasional yang baku.
- Kebutuhan masyarakat yang semakin beragam akan berpengaruh pula dalam upaya fasilitasi pemberdayaan masyarakat

Tantangan tersebut merupakan sebuah realitas, sehingga diperlukan strategi yang tepat dalam mengambil peluang pengembangan terhadap pelayanan.

Sedangkan peluang bagi kapanewon Piyungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Regulasi yang berkaitan dengan pelayanan publik.
- Perkembangan teknologi informasi memudahkan pelayanan administrasi diakses dari mana saja. Penguasaan teknologi khususnya dalam hal penyelenggaraan pelayanan masyarakat berbasis T I dalam pencapaian Bantul *Smart City* dalam mengupayakan terwujudnya *Smart Service* sebagai solusi dalam memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, akurat dan tetap memenuhi protokol kesehatan.
- Dukungan kebijakan dan anggaran dari kepala daerah dalam rangka peningkatan kinerja
- Potensi wisata alternatif yang semakin marak dan aneka ragam turut berperan dalam pemberdayaan masyarakat setempat serta terciptanya lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan perekonomian pengelola dan masyarakat setempat. Wisata alternatif di Kapanewon Piyungan lebih banyak pada wisata alam dengan mengandalkan potensi lokal.



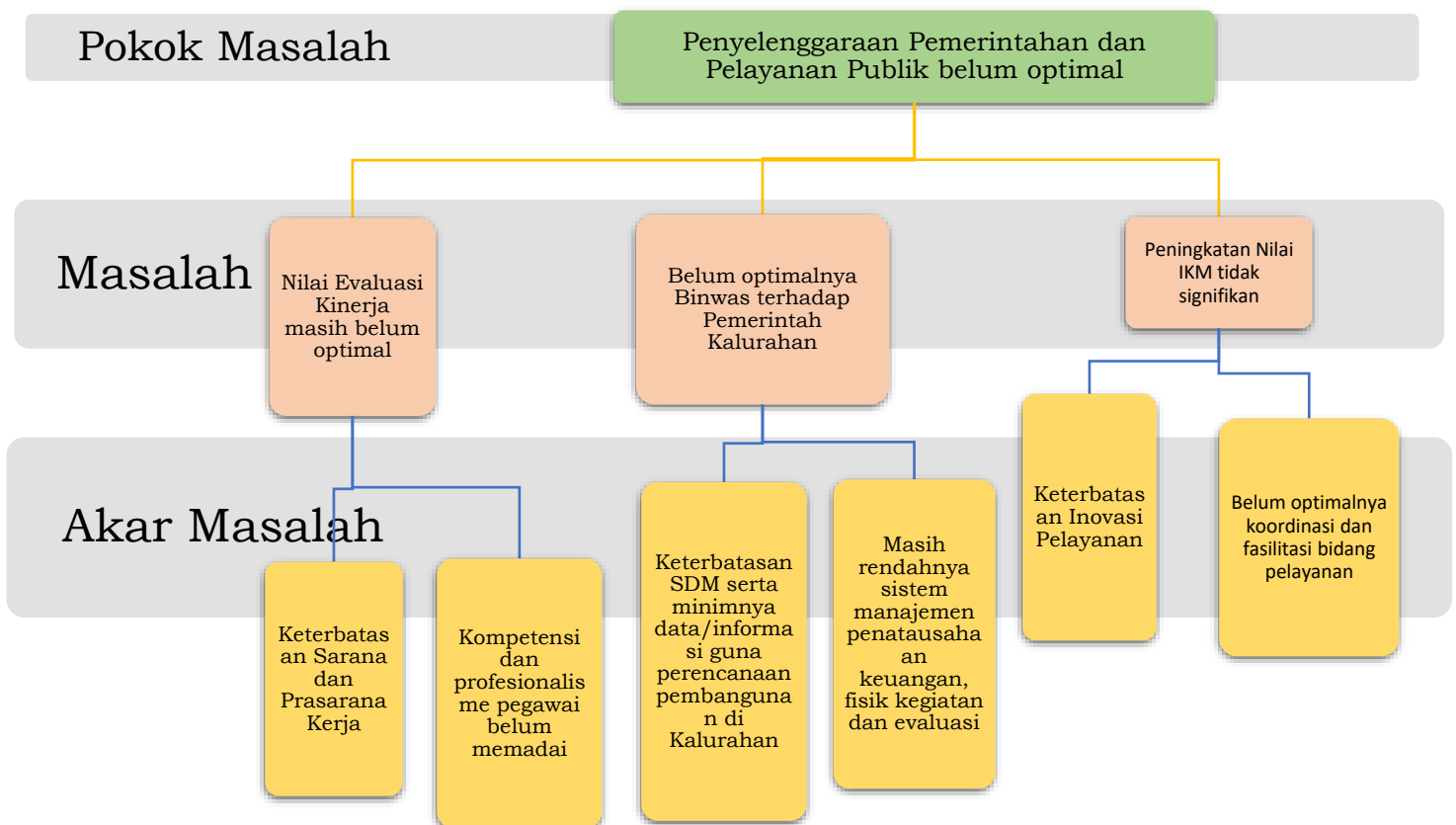
### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kapanewon Piyungan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut :

Gambar 3.1  
Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1  
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Evaluasi Kinerja masih belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kerja</li> <li>- Kompetensi dan profesionalisme pegawai belum memadai</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya Binwas terhadap Pemerintah Kalurahan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan SDM serta minimnya data/informasi guna perencanaan pembangunan di Kalurahan</li> <li>- Masih rendahnya sistem manajemen penatausahaan keuangan, fisik kegiatan dan evaluasi</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Nilai IKM tidak signifikan</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbatasan Inovasi Pelayanan</li> <li>- Belum optimalnya koordinasi dan fasilitasi bidang pelayanan</li> </ul>	

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

**“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika”**

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntable dan menghadirkan pelayanan public yang prima.
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, ramah perempuan, lansia dan difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026, maka Kapanewon Piyungan mendukung Misi Bupati yang ke-1 yaitu Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik yang prima.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Piyungan terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Piyungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

No	Misi ke-1	Program Bupati-Wakil Bupati	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih akuntabel	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien, dan menghadirkan pelayanan publik yang prima.	Banyaknya regulasi/peraturan yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.	Lemahnya Monev terhadap regulasi yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
			Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
			Komitmen untuk melayani masyarakat dengan prima serta meningkatkan inovasi	Rendahnya pola pikir ( <i>mindset</i> ) melayani masyarakat
			Target nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif, dan efisien
			Analisa jabatan dan beban kerja mendorong untuk lebih berkinerja	Belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur

Dari Tabel 3.2.1 telah terpetakan beberapa faktor pendorong sekaligus penghambat dalam upaya pencapaian visi dan misi Bupati beserta Wakil Bupati Bantul. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Piyungan sebagai salah satu unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugas pelayanan publik dan pemerintahan umum kewilayahan di Kapanewon Piyungan, maka beberapa faktor pendorong dapat dimaksimalkan untuk menekan dan menghilangkan faktor penghambat, sehingga pencapaian visi dan misi pertama Bupati beserta Wakil Bupati Kabupaten Bantul dapat lebih mudah terpenuhi. Upaya untuk menguatkan faktor pendorong dan menghilangkan faktor penghambat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi serta ber inovasi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendukung ekonomi kreatif di Kapanewon dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan dan keikutsertaan dalam even promosi secara intensif.
3. Meningkatkan kegiatan, koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan, kepada masyarakat, kalurahan dan stakeholders secara intensif.
4. Meningkatkan fasilitasi, koordinasi dan konsultasi untuk mencapai sinergitas antar berbagai lembaga dalam upaya memaksimalkan peranan pembangunan infrastruktur kewilayahan;

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri**

Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2020 – 2024, sebagai berikut:

1. Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa.
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis pada Tujuan Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :
  - a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia dengan Indikator Sasaran Strategis meliputi :

1. Indeks Demokrasi Indonesia.
  2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam PEMILUKADA dan PEMILU.
  3. Indeks Kinerja ORMAS.
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah dengan indikator sasaran meliputi :
1. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
  2. Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
  3. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
  4. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “BAIK”.
  2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.
- 2) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Kapasitas dan Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Pelayanan Publik yang berkualitas dan Penguatan Inovasi, sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
  2. Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
  3. Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
  4. Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah dengan indikator sasaran, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk hukum Daerah
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif dengan indikator sasaran, meliputi :
1. Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  2. Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  3. Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  4. Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  5. Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
  6. Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  8. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  9. Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  10. Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan dengan indikator sasaran, meliputi :
- 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan indikator sasaran yaitu : Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.
- 3) Sasaran Strategis pada Tujuan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut :
- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran sebagai Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
  - b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas, dengan indikator sasaran, meliputi :
    1. Indeks Pengawasan Internal.
    2. Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.
  - c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dengan indikator sasaran yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.

Keterkaitan tugas dan fungsi Kapanewon terhadap sasaran Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah dengan Kementerian Dalam Negeri seperti terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.3  
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul terhadap Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia	Masih adanya praktik politik yang tidak sehat	Tingkat pendidikan masyarakat relatif tinggi

<b>No</b>	<b>Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
2.	Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah	Pembelajaran tentang Pancasila di lembaga Pendidikan sudah mulai berkurang	Ketersediaan Anggaran untuk penyelenggaraan sosialisasi 4 Pilar kebangsaan
3.	Meningkatnya kewaspadaan nasional	Masih adanya gerakan radikalisme	Kesadaran Masyarakat dalam penghormatan lagu kebangsaan INDONESIA RAYA yang selalu diperdengarkan setiap jam 10:00
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Kapabilitas Personil belum memadai	Adanya Kelompok Organisasi Masyarakat yang bergerak di Bidang TRANTIBUMLINMAS
5.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kualitas yang masih kurang.</li> <li>2. Materi DIKLAT yang kurang representative.</li> <li>3. Kesungguhan dalam mengikuti Diklat masih kurang</li> </ol>	Kompetisi yang sehat dengan didukung pola karier yang jelas
6.	Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah	Masih adanya dualisme pengaturan di tingkat Kalurahan	Tingkat kesadaran pengetahuan terhadap hukum relatif tinggi
7.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya perhatian terhadap hasil inovasi daerah</li> <li>2. Tingkat kemanfaatan sebuah inovasi masih kurang</li> </ol>	Kompetisi antar daerah dalam mendapatkan AWARD
8.	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan	sistem dan ruangan pelayanan yang masih kurang representatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesadaran Masyarakat dalam mengurus kelengkapan administrasi kependudukan</li> <li>2. Penyederhanaan pengurusan pindah masih dalam lingkup satu kapanewon</li> </ol>
9.	Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan	Kurang meratanya tingkat kapabilitas ASN antar wilayah	Kompetisi antar daerah dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

No	Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
10.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	1. Inefisiensi anggaran atau rendahnya budaya kerja dalam melakukan efisiensi anggaran. 2. Masih adanya PATOLOGI BIROKRASI dilingkungan kerja	1. Kemauan dan Komitmen politik yang kuat mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan tingkat terendah 2. Kesamaan Persepsi dan Tujuan. 3. Ketersediaan dana/anggaran
11.	Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas	Manajemen Pelayanan Publik yang kurang maksimal	Profesionalitas dan Kapabilitas ASN yang tinggi
12.	Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri	Apresiasi terhadap hasil penelitian masih kurang	Kompetisi yang sehat dalam mewujudkan tingkat realisasi kinerja perangkat organisasi

### 3.3.2 Telaahan Renstra Perangkat Daerah DIY

Berdasarkan hasil telaahan Kapanewon Piyungan tidak ada Perangkat Daerah di DIY yang berkaitan langsung dengan Kapanewon Piyungan.

### 3.4 Telaahan RTRW Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2020-2030, Ruang Lingkup RTRW mencakup penetapan rencana tata ruang Kabupaten yang meliputi struktur ruang, pola ruang, dan penetapan kawasan strategis yang dilengkapi dengan upaya-upaya yang diperlukan untuk pencapaian tujuan penataan ruang Kabupaten melalui arahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten sampai dengan batas ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sesuai peraturan perundang-undangan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan



untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Perangkat Daerah dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Hasil Telaah RTRW dan Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
 Hasil Telaah RTRW dan Implikasi terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui penetapan pusat pelayanan.	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon.	Pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan, Ibu kota Kapanewon Piyungan masuk dalam Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Ketersediaan lahan yang terbatas.	1. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang 2. Jarak ke ibukota Kabupaten cukup jauh, sehingga diusahakan dapat dilayani di Kapanewon Piyungan
Sistem Persampahan.	Sistem Persampahan.	Pengelolaan sampah dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah.	Meningkatkan kapasitas BUMDes dalam pelayanan pengelolaan sampah rumah tangga dan daur ulang sampah.	Pengurangan, pemilahan, dan pengumpulan sampah di tingkat komunal di kalurahan Srimulyo dan Sitimulyo	Keterbatasan SDM.	Koordinasi dengan Kalurahan berjalan dengan baik.
Telaah Rencana Pola Ruang						

<b>Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang</b>	<b>Struktur/ Pola Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah</b>	<b>Faktor Penghambat</b>	<b>Faktor Pendorong</b>
Kawasan Lindung Kabupaten	1. Kawasan Rawan Bencana.	2. Kawasan rawan bencana tanah longsor dan kekeringan	Meningkatkan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya penanggulangan bencana.	1. Kawasan rawan longsor dan kekeringan di Kalurahan Srimulyo	Keterbatasan kewenangan.	Forum koordinasi pimpinan kapanewon dan pemerintah kalurahan terjalin dengan baik.
Kawasan Budaya	1. Kawasan Peruntukan Pertanian. 2. Kawasan Peruntukan Pariwisata Alternatif	1. Kawasan pertanian lahan basah. 2. Kawasan peruntukan pariwisata alternatif yang tersebar di 3 Kalurahan	1. Meningkatkan koordinasi pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbang. 2. Meningkatkan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.	1. Wilayah Srimartani, Srimulyo dan Sitimulyo. 2. Wilayah Srimartani, Srimulyo dan Sitimulyo.	Keterbatasan anggaran.	Fasilitasi dan pemberdayaan kelompok masyarakat berjalan baik.
	3. Kawasan Peruntukan Industri	3. Pengembangan kawasan industri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten melalui pembangunan	Mempercepat pengembangan infrastruktur pelayanan publik di kawasan ibu kota kapanewon	Pengembangan infrastruktur berupa jalan dan jembatan yang menuju dari dan ke kawasan industri Piyungan	Kurangnya komitmen yang sungguh terhadap kesepakatan (perjanjian) dalam pembentukan	Adanya regulasi terkait kawasan Industri Piyungan

Rencana Struktur Ruang/Pola Ruang	Struktur/Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
		kawasan industri Piyungan.			kawasan industri piyungan	
					<p>1. Belum maksimalnya pengelolaan kawasan industri</p> <p>2. Perencanaan (Road Map) terhadap pembentukan kawasan industri yang tidak serius dan fokus</p>	Tersedianya kawasan industri yang memenuhi syarat
					Tenaga kerja yang tersedia belum dapat diberdayakan, karena kawasan industri yang dibentuk belum beroperasi dengan maksimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedianya tenaga kerja</li> <li>- Tersedianya produk UKM</li> <li>Tersedianya kualitas SDM yang kreatif dan inovatif dalam menggali potensi yang ada</li> </ul>

### **3.4.1 Telaahan KLHS**

Berdasarkan hasil KHLS RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 tidak terdapat rekomendasi terkait tugas dan fungsi serta pelayanan Kapanewon Piyungan, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kapanewon Piyungan sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Kapanewon Piyungan yang akan ditangani pada periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komitmen yang sungguh sungguh terhadap kesepakatan (perjanjian) dalam pembentukan kawasan industri Piyungan.  
Adanya kawasan industri piyungan dari sisi ekonomi sebenarnya menguntungkan Kapanewon Piyungan karena akan banyak menyerap tenaga kerja serta akan banyak muncul sentra sentra ekonomi ( tumbuhnya penyewaan parkir, kontrak rumah, warung makan dll). Akan tetapi dalam perjalanannya masih ada tarik ulur dalam mengimplementasikan perjanjian yang sudah disepakati bersama antara pihak yang terlibat dalam pembentukan kawasan industri piyungan.  
Tarik ulur antara pemangku kebijakan dan pengelola berdampak pada perkembangan kawasan industri yang statis.
2. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Piyungan yang sudah melebihi kapasitas. Dengan beralihnya pengelola dari Kartamantul beralih ke Propinsi DIY tidak membawa dampak yang lebih baik. Pihak Propinsi DIY tidak memberi solusi terhadap kekurangan lahan serta daya tampung yang melebihi kapasitas, DIY hanya mengutamakan pengelolaan sampah dari sisi operasionalnya saja.
3. Banyaknya alih fungsi lahan pada zona merah (zona rawan bencana) menjadi sentra ekonomi. Tidak adanya tindakan tegas aparat terhadap alih fungsi lahan (pelanggaran perda RTRW) pada zona merah berakibat pada tumbuhnya sentra ekonomi baru pada zona merah.
4. Peningkatan koordinasi yang terpadu antar Instansi di wilayah Kapanewon dan PD terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan secara optimal. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan akurat perlu terobosan baru dalam bentuk inovasi pelayanan.
5. Perkembangan wilayah sebagai Destinasi Wisata memungkinkan banyak dibangun sarana dan prasarana yang mendukung wisata di Kapanewon Piyungan pembangunan wisata alternatif diharapkan dapat memberikan

dampak positif bagi pengembangan wilayah di Kapanewon Piyungan. Maraknya pengembangan wisata lokal berimplikasi timbulnya berbagai potensi baru yang signifikan yang sebelumnya belum terkelola, selain itu juga memungkinkan timbulnya gesekan bila tidak dikelola dengan profesional.

6. Adanya kewajiban bagi perusahaan untuk melaksanakan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, maka Kapanewon harus benar-benar mampu memanfaatkan peluang tersebut dengan terus memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kapanewon Piyungan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah  
Kapanewon Piyungan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi awal Renstra (Tahun baseline/ Tahun 2021)	Target					Kondisi akhir Renstra
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	88,03	88,1	88,4	88,8	89,1	89,5	89,5
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	90	92	93	94	95	95	95

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1  
Analisis SWOT

<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<b>KEKUATAN (STRENGTHS)</b>	<b>KELEMAHAN (WEAKNESS)</b>
<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIPD sudah terintegrasi dalam perencanaan dari tingkat Kabupaten, Kapanewon dan Kalurahan.</li> <li>2. Dukungan sistem informatika yang memudahkan pelaksanaan tugas.</li> <li>3. Kretek sebagai smart distric.</li> <li>4. Kewenangan kapanewon dalam pembinaan pemerintah kalurahan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Beberapa indikator dalam evaluasi SAKIP, SPIP, IKM, PPID masih dibawah nilai standard.</li> <li>2. Penempatan tugas fungsi Panewu dalam pembinaan dan pengawasan pemerintah desa tidak ditempatkan dalam program tetapi sub kegiatan.</li> <li>3. Belum terpenuhinya kebutuhan jumlah personil serta kualifikasinya sesuai dengan analisa jabatan, untuk melaksanakan tugas yang cakupannya sangat luas.</li> <li>4. Keterbatasan anggaran.</li> </ol>



<p style="text-align: center;"><b>PELUANG (OPPORTUNITIES)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon dan lintas sector terkait terjalin dengan baik.</li> <li>2. Pembinaan dari PD dan lembaga terkait kepada tim Kapanewon cukup intensif untuk meningkatkan capaian akuntabilitas.</li> <li>3. Ketersediaan jaringan teknologi informasi dan Penggunaan aplikasi siskeudes sudah berjalan dengan baik.</li> <li>4. Adanya pagu kapanewon dalam Mursenbang.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengendalikan pagu kapanewon dan mengarahkan perencanaan program dari tingkat Kalurahan sesuai visi-misi Bupati.</li> <li>2. Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public.</li> <li>3. Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah.</li> <li>4. Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk Tim Perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kapanewon dengan pembinaan dari PD.</li> <li>2. Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan.</li> <li>3. Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi.</li> <li>4. Mempublikasikan capaian akuntabilitas kinerja dan IKM kepada masyarakat melalui media informasi.</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN (THREATS)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil akhir pelayanan tetap berada di Perangkat Daerah teknis terkait.</li> <li>2. Perbedaan kemampuan aparat pemerintah kalurahan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unsur internal dan eksternal kalurahan.</li> <li>3. Pelimpahan kewenangan kepada panewu dalam penyelenggaraan pelayanan belum ada yang berjalan secara efektif.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI S-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan.</li> <li>2. Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.</li> <li>3. Membantu OPD terkait dengan perbanyak publikasi tentang kemudahan prosedur pelayanan melalui berbagai media informasi.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>STRATEGI W-T</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.</li> <li>2. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan.</li> <li>3. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kerja sesuai kewenangan dan prioritas anggaran.</li> <li>4. Meningkatkan pemahaman personel terhadap peraturan perundangan yang terkait tugas pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah kalurahan sesuai bidang tugasnya.</li> </ol>

Tabel 5.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah  
Kapanewon Piyungan

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasar Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber Bhineka Tunggal Ika.</b>			
<b>MISI ke 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong perencanaan program pembangunan kapanewon yang mendukung smart distric untuk pelayanan public.</li> <li>- Memperkuat koordinasi Forkopimkap dan lintas sector untuk menanggapi berbagai permasalahan di wilayah</li> <li>- Memperbaiki kualitas perencanaan dalam Renstra dan Renja agar sesuai kewenangan</li> <li>- Mengoptimalkan kemampuan SDM untuk memanfaatkan teknologi informasi</li> <li>- Melakukan inovasi untuk memperbaiki pelayanan sesuai kewenangan yang dimiliki.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan forkompinkap, instansi terkait dan kalurahan</li> <li>- Mengarahkan pemerintah kalurahan untuk melengkapi dan memperbaharui data SID sebagai bahan penyusunan rencana program dan kegiatan</li> <li>- Membentuk secretariat dan sistem pelayanan PPID pembantu sampai tingkat kalurahan.</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Kalurahan dalam pelaksanaan siklus tahunan Kalurahan</li> <li>- Mengintensifkan pembinaan dan pengawasan kepada Kalurahan sampai penatausahaan dan realisasi fisik kegiatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat sinkronisasi dan optimalisasi perencanaan dengan kalurahan</li> </ul>

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan. Rencana program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif Kecamatan Piyungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kapanewon Piyungan Tahun 2022 – 2026  
Kabupaten Bantul

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
<b>Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>				<b>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</b>	<b>Nilai rata-rata SKM perangkat daerah</b>	<b>88,03</b>	<b>88,1</b>		<b>88,4</b>		<b>88,8</b>		<b>89,1</b>		<b>89,5</b>		<b>89,5</b>		Kapanewon Piyungan	
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat</b>			<b>IKM Kapanewon</b>	<b>Nilai SKM perangkat daerah</b>	<b>90</b>	<b>92</b>		<b>93</b>		<b>94</b>		<b>95</b>		<b>95</b>		<b>95</b>		Kapanewon Piyungan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		04.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun sesuai dengan tatakala target waktu dibagi dengan seluruh dokumen perencanaan dan pengendalian dikali 100%	n/a	100 Per sen	45.300.000	100 Per sen	66.040.000	100 Per sen	66.040.000	100 Per sen	66.040.000	100 Per sen	66.040.000	100 Per sen	309.460.000	Jawatan Praja	
				Tingkat penerapan budaya pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	Nilai hasil survei perhitungan Penerapan Budaya Pemerintahan SATRIYA ASN dan Aparatur di PD dan Kalurahan	n/a	0	0	82 persen	50.000.000	83 persen	50.000.000	84 persen	50.000.000	85 persen	50.000.000	85 persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	
		04.1.04.2.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	Capaian kinerja dari sub kegiatan dibagi target subkegiatan dikalikan 100%	n/a	100 persen	45.300.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	66.040.000	100 persen	309.460.000	Jawatan Praja	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		04.1.04.2.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan tingkat Kecamatan		n/a	3 Dok	45.300.000	3 Dok	66.040.000	3 Dok	66.040.000	3 Dok	66.040.000	3 Dok	66.040.000	15 Dok	309.460.000	Jawatan Praja	Kapanewon Piyungan
			Dokumentasi laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan	Dokumen laporan pengendalian dan evaluasi Dana Keistimewaan per triwulan		n/a	4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		4 Dok		20 Dok			
		04.01.04.2.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	Realisasi pelaksanaan subkeg/ target pelaksanaan subkeg 100%	na	na	na	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	50.000.000	100 Persen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap. Piyungan
		4.01.04.2.02.01	Implementasi Budaya Pemerintahan di Kabupaten Bantul	Dokumen Rencana Aksi Budaya Pemerintahan di Kapanewon		na	na	na	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	50.000.000	4 dokumen	200.000.000	Sub Bagian Umum Sekretariat	Kap. Piyungan
			ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya	ASN dan Pamong Kalurahan yang mendapatkan internalisasi Budaya Satriya					20 orang		20 orang		20 orang		20 orang		80 orang			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>Capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	<b>Nilai AKIP PD yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah</b>	<b>80 Angka</b>	<b>82 Angka</b>	<b>2.929.732.720</b>	<b>83 Angka</b>	<b>3.027.690.175</b>	<b>84 Angka</b>	<b>3.202.589.175</b>	<b>85 Angka</b>	<b>3.411.564.175</b>	<b>86 Angka</b>	<b>3.842.479.175</b>	<b>86 Angka</b>	<b>16.414.055.420</b>		
		07.01.01.02.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian kinerja perencanaan dan evaluasi perangkat daerah</b>	<b>Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>6.500.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>10.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>20.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>106.500.000</b>		
		07.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan		3 Dok	6 Dok	2.400.000	6 Dok	5.000.000	6 Dok	10.000.000	6 Dok	14.500.000	6 Dok	20.000.000	30 Dok	51.900.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Hasil Evaluasi		7 Dok	4 Dok	4.100.000	4 Dok	5.000.000	4 Dok	10.000.000	4 Dok	15.500.000	4 Dok	20.000.000	20 Dok	54.600.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Dokumen keuangan		37 Dok	37 Dok		37 Dok		37 Dok		37 Dok		37 Dok		185 Dok			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Dokumen Kepegawain		1 Dok	-		-		-		-		-		-			
		07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengadmi nistrasian keuangan perangkat daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 Persen	100 Persen	2.447.457.720	100 Persen	2.464.808.175	100 Persen	2.493.462.175	100 Persen	2.517.658.175	100 Persen	2.543.088.175	100 Persen	12.466.474.420		
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN		14 kali	14 kali	1.598.133.545	14 kali	1.606.444.000	14 kali	1.629.898.000	14 kali	1.649.294.000	14 kali	1.671.724.000	14 kali	8.155.493.545		
				Pembayaran TPP		12 kali	12 kali	806.364.175	12 kali	806.364.175	12 kali	806.364.175	12 kali	806.364.175	12 kali	806.364.175	12 kali	4.031.820.875		
		07.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Honorarium Pengelola Keuangan, BMD dan Kepegawain		108 Ob	108 Ob	42.960.000	108 Ob	52.000.000	108 Ob	57.200.000	108 Ob	62.000.000	108 Ob	65.000.000	540 Ob	279.160.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian kinerja pengelolaan administrasi umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	183.995.232	100 persen	214.239.920	100 persen	257.300.000	100 persen	351.800.000	100 persen	469.800.000	100 persen	1.477.135.152		
		07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi listrik		11 Jenis	13 Jenis	7.203.000	10 Jenis	12.700.000	10 Jenis	15.000.000	15 Jenis	30.000.000	20 Jenis	40.000.000	20 Jenis	104.903.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK		34 Jenis	32 Jenis	20.218.232	25 Jenis	27.039.920	25 Jenis	30.000.000	35 Jenis	45.000.000	35 Jenis	55.000.000	35 Jenis	177.258.152	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan peralatan kebersihan		18 Jenis	16 Jenis	7.201.500	12 Jenis	12.700.000	12 Jenis	15.000.000	18 Jenis	25.000.000	12 Jenis	43.000.000	18 Jenis	102.901.500	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan		3 Jenis	2 Jenis	14.498.000	2 Jenis	16.500.000	3 Jenis	25.000.000	5 Jenis	30.000.000	7 Jenis	45.000.000	7 Jenis	130.998.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Penggandaan		50.000 lembar	50.000 lembar		50.000 lembar		50.000 lembar		50.000 lembar		50.000 lembar		250.000 lembar	0		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan langganan surat kabar		1 Jenis	2 Jenis	2.400.000	3 Jenis	4.800.000	3 Jenis	4.800.000	4 Jenis	6.800.000	4 Jenis	6.800.000	4 Jenis	25.600.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan hasil rapat		56 Dok	35 Dok	129.499.500	46 Dok	136.500.000	46 Dok	160.000.000	50 Dok	200.000.000	50 Dok	250.000.000	247 Dok	875.999.500	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Perjalanan dinas dalam daerah		158 op	180 op		180 op		180 op		200 op		200 op		940 op			
				Perjalanan dinas luar daerah		3 op	6 op		6 op		6 op		6 op		7 op		31 op			
		07.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Laporan penataan arsip		n/a	2 Dok	2.975.000	2 Dok	4.000.000	2 Dok	7.500.000	3 Dok	15.000.000	5 Dok	30.000.000	14 Dok	59.475.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.02.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian kinerja pengadaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	21.100.000	100 persen	48.600.000	100 persen	75.000.000	100 persen	100.000.000	100 persen	200.000.000	100 persen	444.700.000		
		07.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin lainnya		1 jenis	3 jenis	21.100.000	3 jenis	48.600.000	5 jenis	75.000.000	6 jenis	100.000.000	10 jenis	200.000.000	10 jenis	444.700.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.02.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja penyediaa n jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	153.130.480	100 persen	155.042.080	100 persen	217.000.000	100 persen	253.000.000	100 persen	311.000.000	100 persen	1.089.172.560		
		07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai dan benda Pos		90 lembar	80 lembar	800.000	80 lembar	800.000	200 lembar	2.000.000	300 lembar	3.000.000	600 lembar	6.000.000	1.260 lembar	12.600.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Rekening Listrik		12 Bulan	12 Bulan	48.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	70.000.000	12 Bulan	80.000.000	60 Bulan	298.000.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Pembayaran Rekening Telephon		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		60 Bulan	0		
				Pembayaran Rekening Air		12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		60 Bulan	0		
		07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		40 unit	2 Jenis	8.990.000	2 Jenis	10.000.000	3 Jenis	20.000.000	5 Jenis	30.000.000	8 Jenis	50.000.000	8 Jenis	118.990.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan Keamanan dan Ketertiban kantor		1 Dok	12 Dok	95.340.480	12 Dok	94.242.080	12 Dok	145.000.000	12 Dok	150.000.000	12 Dok	175.000.000	60 Dok	659.582.560	Sekretariat	Kapanewon Piyungan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				Laporan kebersihan lingkungan kantor		1 Dok	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		60 Dok	0		
				Laporan kegiatan pelayanan umum kapanewon		2 Dok	24 Dok		24 Dok		24 Dok		24 Dok		24 Dok		120 Dok	0		
				Jasa Kebersihan Kantor		-	-		-		-		-		-		-	0		
				Jasa Keamanan Kantor		-	-		-		-		-		-		-	0		
				Jasa Petugas pelayanan		-	-		-		-		-		-		-	0		
		07.01.01.02.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian kinerja pemeliharaan barang milik daerah	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	117.549.288	100 persen	135.000.000	100 persen	139.827.000	100 persen	159.106.000	100 persen	278.591.000	100 persen	830.073.288		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4		1 Unit	1 Unit	107.000.000	1 Unit	115.000.000	1 Unit	120.147.000	1 Unit	137.106.000	1 Unit	170.000.000	5 Unit	649.253.000	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
				Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2		6 Unit	6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 Unit		30 Unit		Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas		2 Unit	2 Unit	10.549.288	2 Unit	20.000.000	2 Unit	19.680.000	2 Unit	22.000.000	2 Unit	108.591.000	10 Unit	180.820.288	Sekretariat	Kapanewon Piyungan
		07.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Jenis layanan standar kecamatan yang dilaksanakan / jenis layanan standar kecamatan * 100%</b>	<b>100 persen</b>	<b>92 persen</b>	<b>42.072.500</b>	<b>93 persen</b>	<b>75.000.000</b>	<b>94 persen</b>	<b>115.000.000</b>	<b>95 persen</b>	<b>125.000.000</b>	<b>96 persen</b>	<b>165.000.000</b>	<b>96 persen</b>	<b>522.072.500</b>		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	29.987.500	100 persen	55.000.000	100 persen	95.000.000	100 persen	95.000.000	100 persen	115.000.000	100 persen	389.987.500		
		07.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan koordinasi forkompim kap		4 Dok	4 Dok	12.010.000	4 Dok	25.000.000	4 Dok	20.000.000	4 Dok	55.000.000	4 Dok	50.000.000	20 Dok	162.010.000	Jawatan Praja	Kapanewon Piyungan
		07.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	catatan hasil fasilitasi kapanewon kepada kalurahan		4 Dok	4 Dok	17.977.500	4 Dok	30.000.000	6 Dok	75.000.000	4 Dok	40.000.000	4 Dok	65.000.000	20 Dok	227.977.500	Jawatan Praja	Kapanewon Piyungan



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	((Jumlah kelompok usaha yang dibina/jumlah kelompok usaha *100%) + (Jumlah kelompok sosial kemasyarakatan yang dibina/jumlah kelompok sosial kemasyarakatan*100%))/2	100 persen	100	124.932.500	100 persen	136.400.000	100 persen	155.000.000	100 persen	177.950.000	100 persen	235.750.000	100 persen	830.032.500		
		07.01.03.02.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100	109.932.500	100 persen	113.300.000	100 persen	129.970.000	100 persen	150.000.000	100 persen	205.000.000	100 persen	708.202.500		





Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan KerangkaPendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.03.02.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	n/a	100 persen	15.000.000	100 persen	23.100.000	100 persen	25.030.000	100 persen	27.950.000	100 persen	30.750.000	100 persen	121.830.000		
		07.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan pendampingan pengembangan usaha masyarakat		n/a	2 Dok	15.000.000	2 Dok	23.100.000	2 Dok	25.030.000	2 Dok	27.950.000	2 Dok	30.750.000	10 Dok	121.830.000	Jawatan Kemakmuran	Kapanewon Piyungan
		07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban kapanewon	(Jumlah gangguan trantibum yang ditangani/jumlah gangguan trantibum)*100%	100 persen	100 persen	135.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	165.000.000	100 persen	185.000.000	100 persen	245.000.000	100 persen	880.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Piyungan
		07.01.04.02.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Capaian kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	135.000.000	100 persen	150.000.000	100 persen	165.000.000	100 persen	185.000.000	100 persen	245.000.000	100 persen	880.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan penanggulangan bencana			2 Dok	135.000.000	2 Dok	150.000.000	2 Dok	165.000.000	2 Dok	185.000.000	2 Dok	245.000.000	10 Dok	880.000.000	Jawatan Keamanan	Kapanewon Piyungan
				Laporan kejadian trantibum di kapanewon			2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		2 Dok		10 Dok			
				Laporan pelaksanaan upacara hari besar		n/a	12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		12 Dok		60 Dok			
				Laporan pemantauan keamanan lingkungan		2 Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		07.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan umum</b>	<b>Cakupan Wilayah Pelayanan</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>8.015.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>17.500.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>35.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>40.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>45.000.000</b>	<b>100 persen</b>	<b>145.515.000</b>	<b>Jawatan Praja</b>	<b>Kapanewon Piyungan</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.05.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Hasil Penjumlahan dari capaian kinerja indikator per sub kegiatan dibagi jumlah indikator sub kegiatan dikali 100%	100 persen	100 persen	8.015.000	100 persen	17.500.000	100 persen	35.000.000	100 persen	40.000.000	100 persen	45.000.000	100 persen	145.515.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula	Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Akhir Periode			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		07.01.05 .2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan pembinaan peningkatan ketahanan nasional		n/a	2 Dok	8.015.000	2 Dok	17.500.000	2 Dok	35.000.000	2 Dok	40.000.000	2 Dok	45.000.000	10 Dok	145.515.000	Jawatan Praja	Kapanewon Piyungan
				Lap Monitoring dan Evaluasi Pilkada		-	-	-	-	-	1 Dok	-	-	-	-	-	1 Dok	-		
					<b>Jumlah</b>			<b>3.285.052.720</b>		<b>3.522.630.175</b>		<b>3.788.629.175</b>		<b>4.055.554.175</b>		<b>4.649.269.175</b>		<b>19.301.135.420</b>		

Keterangan:\*) Anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ada perbedaan dengan RPJMD, karena ada penambahan anggaran gaji AS.N dan TPP yang semula menjadi satu di BPKPAD dan BKPSDM

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021 - 2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kapanewon Piyungan dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Kapanewon Piyungan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.1  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran  
RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025		
A	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,03	88,10	88,40	88,80	89,10	89,50	89,50	
B	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM ) Kapanewon	90	92	93	94	95	95	95	
1	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	n/a	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Jawatan Praja
	Tingkat penerapan budaya Pemerintahan SATRIYA pada ASN di Kabupaten Bantul	n/a	0 Persen	82 Persen	83 Persen	84 Persen	85 Persen	85 Persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
1.1	Capaian kinerja perencanaan dan pengendalian kegiatan keistimewaan	n/a	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Praja
1.2	Capaian Kinerja Peningkatan Budaya Pemerintahan	n/a	0 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Sub Bagian Umum Sekretariat
2	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	92 persen	93 persen	94 persen	95 persen	96 persen	96 persen	96 persen	Jawatan Pelayanan
2.1	Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kapanewon	100 Persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Pelayanan
2.2	Capaian kinerja pelayanan kapanewon	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Pelayanan
3	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
3.1	Capaian kinerja pemberdayaan masyarakat kalurahan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran Dan Jawatan Sosial
3.2	Capaian kinerja pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	Jawatan Kemakmuran



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan hal-hal antara lain:

- a. Seluruh aparaturnya melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparaturnya melakukan evaluasi hasil Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kapanewon Piyungan yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.